

FRAMING MEDIA ASING DAN PERAN *OPINION LEADERS* DALAM MEMBENTUK PERSEPSI TENTANG RESPON KEBIJAKAN BANJIR DI ACEH

Khayranil Ula¹, Darmadi², Muhammad Saleh³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

E-mail : khayranilula@gmail.com

ABSTRAK

Pemberitaan media asing mengenai krisis banjir Aceh pada November 2025 menghasilkan narasi kritis terhadap respons kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain membentuk persepsi internasional, narasi-narasi tersebut juga masuk ke dalam wacana publik domestik melalui perantaraan para pemimpin opini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media asing membingkai respons pemerintah terhadap bencana serta menganalisis peran pemimpin opini dalam menafsirkan dan menyebarkan bingkai tersebut di dalam ruang komunikasi nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menerapkan analisis framing Robert N. Entman yang dikombinasikan dengan kerangka two-step flow of communication. Data dikumpulkan dari pemberitaan media asing yang dipublikasikan oleh Asia News Network, Lowy Institute, dan The Straits Times, serta didukung oleh dokumen resmi pemerintah sebagai data banding. Analisis difokuskan pada pendefinisian masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan implikasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media asing secara konsisten membingkai banjir Aceh sebagai krisis kemanusiaan sekaligus krisis tata kelola struktural, serta menggambarkan respons pemerintah sebagai lambat, terfragmentasi, dan kurang terkoordinasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis framing dengan perspektif two-step flow, yang menunjukkan bagaimana bingkai media asing memperoleh relevansi domestik melalui peran pemimpin opini sebagai perantara simbolik. Penelitian ini berkontribusi pada kajian ilmu komunikasi dengan menyoroti peran narasi media transnasional dalam membentuk komunikasi kebijakan di tingkat domestik. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan bencana yang transparan, responsif, dan koheren guna menjaga kepercayaan publik dalam situasi krisis.

Kata kunci: Banjir Aceh; media asing; analisis framing; pemimpin opini; *two-step flow of communication*.

I. PENDAHULUAN

Banjir sebagai bencana alam yang berulang di Sumatra, khususnya Aceh, merepresentasikan krisis tata kelola bencana (*disaster governance*) yang bersifat struktural dan sistemik. Banjir musiman yang terjadi terutama pada musim hujan tidak hanya dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan ekstrem dan fenomena La Niña, tetapi juga diperparah oleh degradasi lingkungan akibat

deforestasi, erosi, dan sedimentasi yang mengganggu keseimbangan Daerah Aliran Sungai (Noe, 2025). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga November 2025 terjadi 2.726 bencana hidrometeorologi di Indonesia, dengan banjir bandang di Sumatra akhir November 2025 menelan ratusan korban jiwa di tiga provinsi terdampak (Noe, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa banjir telah berkembang

menjadi ancaman musiman yang mencerminkan kegagalan penanganan akar masalah secara berkelanjutan.

Aceh, sebagai wilayah dengan otonomi khusus pasca-konflik dan karakter geografis pegunungan Bukit Barisan, memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi akibat aliran air cepat dari hulu ke hilir serta sedimentasi sungai yang dipicu oleh deforestasi dan aktivitas pertambangan ilegal. Banjir besar pada akhir November 2025 melanda 16 kabupaten/kota, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah, dengan ketinggian air mencapai 1–3 meter. Dampak bencana ini meliputi ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur vital, serta terhentinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Muntahar, 2025).

Selain menimbulkan kerugian material, banjir di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya juga menyingkap lemahnya respons krisis negara. Lambannya tindakan pemerintah meskipun peringatan dini telah dikeluarkan oleh BMKG, keterbatasan koordinasi pusat dengan daerah, serta kebijakan lingkungan yang bersifat reaktif menjadi sorotan utama dalam penanganan bencana ini, seperti pencabutan izin perusahaan penebangan liar yang baru

dilakukan setelah bencana terjadi alih-alih melalui pencegahan proaktif. (“Pemerintah Larang Kegiatan Delapan Korporasi Yang Turut Memicu Banjir Di Sumatra Utara,” 2025). Meskipun telah ada berbagai langkah darurat yang diambil oleh pemerintah seperti penggerahan tim SAR, pendirian posko, serta rehabilitasi DAS dilakukan oleh BNPB, BPBA, dan kementerian terkait (Kehutanan, 2025), Namun demikian, langkah-langkah tersebut tetap menuai kritik, terutama terkait lambatnya penetapan status darurat nasional, sehingga mendorong pemerintah daerah membuka permintaan dukungan kepada lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF, yang mencerminkan upaya kebijakan publik lintas sektor untuk mitigasi dan pemulihan jangka panjang, sekaligus menegaskan bahwa tata kelola banjir di Aceh dan Sumatra masih berada dalam tarik-menarik antara respons darurat, koordinasi kelembagaan, dan agenda reformasi struktural pengelolaan lingkungan (Indonesia, 2025).

Dalam era globalisasi informasi, respons negara terhadap bencana seperti banjir tidak lagi hanya dievaluasi oleh publik domestik, melainkan juga oleh komunitas internasional melalui media sosial, lembaga global, dan platform digital yang

menyebarluaskan berita secara real-time. Pernyataan ini menekankan bahwa kecepatan, transparansi, dan efektivitas penanganan bencana menjadi sorotan global, memengaruhi citra negara serta bantuan internasional. (Hilberts et al., 2025) Media sosial dan platform global memungkinkan penyebaran video, foto, serta laporan warga secara instan, sehingga dunia bisa menyaksikan respons pemerintah secara langsung, termasuk keterlambatan evakuasi atau distribusi bantuan. Misalnya, banjir di Indonesia sering viral di *Twitter* atau *TikTok*, Wahyuningsih, 2020), memicu kritik dari aktivis lingkungan internasional seperti Greenpeace jika kebijakan domestik dianggap gagal (Peace, 2025).

Tidak hanya media sosial seperti *tiktok* dan *twitter* saja, disisi lain Media berita asing juga memainkan peran strategis dalam membingkai respons kebijakan negara berkembang seperti Indonesia, tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi membentuk makna normatif dan penilaian publik. Dalam pemberitaan banjir di Aceh, framing yang diberikan dominan menyoroti ketidakefektifan, kurangnya koordinasi, serta hilangnya legitimasi pemerintah, seperti terlihat pada headline "*Frustration over Indonesian government's poor disaster*

response" (Asia News Network), "*Sumatra floods crisis management criticized as stuck*" (Lowy Institute), dan "*Outrage as government blocks foreign disaster aid*" (The Straits Times). Isu framing ini menekankan narasi krisis dan kegagalan negara, yang memengaruhi persepsi global serta domestik terhadap kebijakan bencana.

Informasi dari media dan lembaga riset asing seperti BBC, Asia News Network, Lowy Institute dan The Straits Times mengenai banjir dahsyat di Sumatra khususnya Aceh pada November 2025, tidak diterima publik Indonesia secara langsung, melainkan difilter dan diterjemahkan oleh opinion leaders seperti akademisi oleh Hardiman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengkritik eksplorasi lingkungan, pakar UGM soal pembangunan ekstraktif, analis kebijakan serta aktivis (Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia yang mendesak status bencana nasional), aktivis masyarakat sipil dan organisasi seperti lembaga Deep Intelligent Research, (Kompas, 2025) serta tokoh lokal seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Aceh Utara Iskandar yang menangis di depan publik sambil mengkritik respons pusat. (Ghofari, 2025)

Opinion leaders berperan sebagai perantara krusial dalam menjembatani kritik internasional khususnya yang bersumber dari media asing terhadap lambatnya respons pemerintah, dengan menerjemahkannya ke dalam wacana domestik yang sesuai dengan konteks budaya dan politik lokal. (Fatharani, 2023) Dalam bencana banjir Sumatra November 2025, peran ini terlihat melalui kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, seperti penolakan bantuan asing dari Malaysia, Jepang, dan Uni Emirat Arab serta tidak ditetapkannya status bencana nasional, yang kemudian membentuk persepsi publik nasional terhadap tata kelola bencana.

Sementara media asing membangun persepsi global negatif mengenai ketidakefektifan pengelolaan bencana Indonesia, opinion leaders termasuk akademisi, analis, dan aktivis berfungsi sebagai penyaring dan penyebar informasi yang efektif, sejalan dengan model komunikasi dua tahap (*two-step flow of communication*), di mana informasi massa mengalir melalui perantara aktif sebelum mencapai masyarakat luas, sebagaimana ditegaskan Wati (2021) di *Proceeding Universitas Dharmawangsa* yang menekankan efektivitas komunikasi massa

bergantung pada opinion leaders sebagai penyaring dan penyebar ide ke masyarakat, (Wati, 2021) serta Adi dkk (2022) di Methoda yang mengonfirmasi model dua tahap dalam komunikasi bencana di mana opinion leaders tahap pertama menjadi komunikator tahap kedua untuk diseminasi ke kelompok masyarakat. (Adi et al., 2022)

Sejumlah penelitian membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran dalam menyampaikan informasi krisis kepada masyarakat saat terjadi bencana alam, terutama peran komunikasi krisis dalam memberikan arahan dan menekan kepanikan publik melalui media televisi. (Kustiawan et al., 2024) Selain itu, terdapat juga studi yang mengkaji kebijakan penanggulangan bencana secara normatif dengan menelaah kerangka hukum dan kebijakan manajemen bencana di berbagai negara untuk membandingkan pendekatan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam meningkatkan respons terhadap bencana. (Rahmawan et al., 2024) Di sisi lain, sebuah kajian menyoroti peran media asing, namun umumnya lebih menekankan pada isu konflik politik atau pembentukan citra negara secara umum, misalnya melalui analisis persepsi internasional berbasis media sosial selama

pandemi COVID-19 (Chen et al., 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada komunikasi krisis pemerintah, kajian kebijakan secara normatif, serta peran media asing dalam konteks umum seperti konflik politik dan citra negara. Hingga saat ini, masih sedikit kajian yang secara khusus menelaah bagaimana framing media asing membentuk persepsi publik terhadap respons kebijakan banjir di Aceh. Selain itu, peran opinion leaders dalam membentuk penafsiran dan respons masyarakat terhadap pemberitaan media asing juga belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana media asing membingkai respons kebijakan pemerintah Indonesia dalam krisis banjir di Aceh pada periode November–Desember 2025. Analisis framing merujuk pada model Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu *problem definition, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation*, guna mengidentifikasi definisi masalah, penetapan

aktor penyebab, penilaian kebijakan, serta implikasi solusi yang dibangun media.

Sumber data primer terdiri atas tiga teks media asing yang membahas respons kebijakan pemerintah Indonesia terhadap banjir di Sumatra, khususnya Aceh, yaitu: *Frustration over Indonesian government's poor disaster response* (Asia News Network, 5 Desember 2025), *Sumatra floods crisis management criticized as stuck* (Lowy Institute, 8 Desember 2025), dan *Outrage in Indonesia as government blocks foreign disaster aid to Sumatra* (The Straits Times, 20 Desember 2025). Ketiga media dipilih karena posisinya sebagai rujukan informasi internasional yang berpengaruh dalam membentuk persepsi global serta kerap menjadi referensi bagi media nasional dan aktor kebijakan di Indonesia.

Dokumen resmi pemerintah berupa siaran pers BNPB dan Kementerian Kehutanan digunakan sebagai data pendukung untuk membandingkan narasi resmi pemerintah dengan framing media asing, bukan sebagai sumber utama analisis. Unit analisis penelitian ini adalah teks pemberitaan dan analisis media asing yang dikaji secara utuh, dengan fokus pada struktur narasi kebijakan, penilaian normatif, serta kutipan aktor elit dan pakar. Rentang

data penelitian mencakup periode pemberitaan pascakrisis, yaitu 5–20 Desember 2025, yang merepresentasikan fase awal respons pemerintah dan eskalasi kritik kebijakan di tingkat internasional.

Kerangka *two-step flow of communication* digunakan secara diskursif-konseptual untuk menjelaskan peran *opinion leaders* pada dua level analisis, yaitu aktor elit dan pakar yang dikutip media asing sebagai *symbolic intermediaries* pada level internasional, serta *opinion leaders* domestik yang menerjemahkan dan melegitimasi framing tersebut dalam wacana kebijakan nasional. Analisis ini tidak diarahkan untuk mengukur efek media secara kuantitatif, melainkan untuk memahami proses mediasi makna dan legitimasi framing dalam komunikasi kebijakan bencana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai pola framing media asing, Tabel 1 merangkum definisi masalah, aktor yang disalahkan, evaluasi moral, serta implikasi kebijakan yang dibangun oleh *Asia News Network*, *Lowy Institute*, dan *The Straits Times* dalam pemberitaan krisis banjir Aceh.

Tabel 1. Ringkasan Framing Media Asing terhadap Banjir Aceh dan Respons Kebijakan Pemerintah Indonesia

Media	Definisi Masalah	Aktor yang Disalahkan	Evaluasi Moral	Implikasi Kebijakan
Asia News Network	Banjir Aceh sebagai krisis kemanusiaan berskala besar dan berlarut	Pemerintah pusat; lemahnya koordinasi pusat-daerah	Respons lamban, tidak empatik, dan tidak siap menghadapi skala krisis	Penetapan status darurat nasional; percepatan distribusi bantuan
Lowy Institute	Krisis struktural akibat kegagalan tata kelola lingkungan dan kebijakan jangka panjang	Negara dan orientasi kebijakan yang reaktif (reactionary governance)	Kegagalan institisional dan simbolisme kebijakan	Reformasi kebijakan lingkungan; mitigasi risiko jangka panjang
The Straits Times	Tragedi kemanusiaan yang dipolitisasi dan dikalkulasi secara administratif	Pemerintah pusat; elit politik nasional	Arogansi kebijakan dan pengabaian prinsip kemanusiaan	Pembukaan bantuan internasional; transparansi komunikasi krisis

Konsep Framing Media

Robert N. Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, memberikan penilaian moral, dan merekomendasikan solusi tertentu kepada audiens (Hafidli et al., 2023). Dalam framing, terdapat dua elemen utama yang saling terkait, yaitu seleksi isu yang dilakukan ketika media memilih aspek tertentu dari suatu peristiwa untuk ditampilkan dan penekanan aspek spesifik yang membimbing audiens memahami realitas melalui bingkai interpretatif yang disusun jurnalis atau editor.(Butsi, 2019). Proses ini bersifat tidak netral karena framing

secara sistematis membentuk makna dominan dan memengaruhi cara publik menilai suatu peristiwa.

Dalam isu-isu kebijakan negara, framing media berfungsi sebagai alat kuat dalam pembentukan makna karena melalui seleksi dan penonjolan elemen tertentu, media tidak hanya menyajikan fakta tapi secara aktif membangun interpretasi dominan yang memandu audiens memahami kompleksitas isu kebijakan, misalnya dengan mendefinisikan masalah kebijakan sebagai krisis ekonomi akibat regulasi pemerintah daripada faktor pasar bebas, sehingga makna "kegagalan negara" menjadi narasi utama.(Eriyanto, 2002) Proses ini menciptakan efek *cascading* di mana define problems membentuk persepsi awal bahwa kebijakan tertentu adalah akar masalah, diagnose causes menyalahkan aktor spesifik seperti pejabat atau partai politik, make moral judgment menambahkan lapisan nilai etis yang membangkitkan dukungan atau penolakan emosional, dan suggest remedies mengarahkan opini publik menuju solusi yang sesuai dengan agenda pembuat framing, sehingga persepsi kebijakan bergeser dari netral menjadi partisan. (Widyaya & Setiawan, 2024), sehingga efek priming dari framing ini membuat audiens menilai

kebijakan berdasarkan kriteria yang diframing.

Media Asing sebagai Aktor Politik Global

Media asing beroperasi bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai aktor politik yang terintegrasi dalam dinamika kekuasaan global melalui mekanisme soft power, di mana pengaruh dicapai melalui daya tarik budaya, nilai, dan narasi daripada paksaan militer atau ekonomi, seringkali media asing memanfaatkan diplomasi kemanusiaan untuk membentuk opini publik internasional, sering kali dengan menyoroti krisis di negara berkembang sebagai alat untuk mempromosikan agenda donor atau intervensi. Selain itu, praktik moral surveillance terhadap negara berkembang melibatkan pengawasan normatif yang menekankan kegagalan tata kelola lokal, sehingga memperkuat hierarki global di mana media Barat bertindak sebagai penjaga moral atas pelaku *Global South*.

Global watchdog menggambarkan peran media internasional sebagai pengawas independen yang memantau pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan, meskipun sering kali dipengaruhi oleh agenda geopolitik negara asal media tersebut. Konsep ini menciptakan *normative pressure*, yaitu tekanan normatif yang memaksa negara

berkembang untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan standar Barat melalui liputan kritis yang membentuk opini publik global. Sementara itu, humanitarian gaze merujuk pada tatapan kemanusiaan yang dehumanisasi korban di negara miskin dengan membingkai mereka sebagai objek belas kasihan, sekaligus mengabaikan akar struktural seperti ketidakadilan global sambil memposisikan media sebagai pahlawan penyelamat. Konsep-konsep ini saling terkait dalam operasi media asing, di mana pengawasan moral (*global watchdog*) menghasilkan tekanan untuk reformasi (*normative pressure*), yang pada akhirnya memperkuat tatapan paternalistik (*humanitarian gaze*) terhadap negara seperti Indonesia.

Two Step Flow Theory

Konsep dasar *two-step flow of communication* atau model aliran komunikasi dua tahap yang dikembangkan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz pada tahun 1940-an muncul sebagai respons terhadap asumsi awal teori hipodermik atau *magic bullet* yang menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung dan kuat terhadap audiens secara massal. Melalui studi empiris mereka pada pemilu Amerika Serikat tahun 1940 dalam buku *Personal Influence* (1955),

Lazarsfeld dan Katz menemukan bahwa hanya sekitar 5% pemilih yang mengubah preferensi politiknya karena paparan langsung dari surat kabar atau radio, sementara pengaruh utama justru datang dari diskusi interpersonal dengan orang-orang terdekat.

Dalam model ini, proses penyebaran informasi terjadi melalui dua tahap utama: tahap pertama melibatkan media massa seperti radio, koran, atau televisi yang menyampaikan pesan kepada *opinion leaders* atau pemimpin opini, yaitu individu yang lebih aktif, berpendidikan tinggi, sering terpapar media, dan memiliki akses luas ke jaringan sosial. *Opinion leaders* ini kemudian memproses, menginterpretasikan, dan menyebarkan informasi tersebut pada tahap kedua melalui komunikasi antarpersonal kepada audiens pasif atau *less active sections of the population* yang kurang terlibat langsung dengan media, sehingga pesan media tidak langsung memengaruhi opini publik melainkan difilter dan diperkuat oleh faktor sosial ini.

Dalam era media global saat ini, konsep *two-step flow of communication* Lazarsfeld dan Katz tetap sangat relevan karena evolusi platform digital seperti media sosial telah mengubah *opinion leaders*

tradisional menjadi influencer, buzzer, atau *key opinion leaders* (KOL) yang memediasi alur informasi secara masif di tingkat global.(Almakaty, 2025) Berdasarkan laporan *The Global State of Digital in October 2025* yang dirilis oleh *We Are Social*, menunjukkan bahwa lebih dari 2 dari 3 penduduk dunia menggunakan media sosial, di mana informasi dari media global seperti *TikTok* atau *Twitter* mengalir melalui influencer yang menginterpretasikan dan menyebarkannya ke audiens luas, menciptakan efek *ripple* yang memperkuat pengaruh interpersonal daripada paparan langsung. Model ini relevan karena algoritma platform global memprioritaskan konten dari *opinion leaders* yang kredibel, sehingga pesan global tentang isu seperti iklim atau politik menyebar melalui jaringan sosial yang homofilos, mirip dengan dinamika 1940-an tapi dalam skala hiper-konektif. (Serafino et al., 2024)

Adaptasi *two-step flow* dalam konteks media asing dan kebijakan nasional melibatkan pemanfaatan *opinion leaders* lokal untuk memfilter dan menyerap pesan dari media global agar selaras dengan kepentingan nasional, seperti yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam strategi humas digital di mana influencer

domestik digunakan untuk membangun citra positif kebijakan publik terhadap narasi asing. Media asing seperti Al Jazeera atau Reuters sering memengaruhi opini melalui tahap pertama, tapi pemerintah nasional mengadaptasi model ini dengan merekrut virtual opinion leaders atau aktivis untuk tahap kedua, menyebarkan interpretasi kebijakan seperti vaksinasi atau ekonomi yang disesuaikan norma lokal guna menangkal propaganda asing. (Candra et al., 2025) Dalam praktiknya, adaptasi ini terlihat pada kebijakan nasional seperti yang dilakukan negara-negara lain seperti China menggunakan model ini untuk *city international image communication* di *Twitter*, di mana opinion leaders nasional memverifikasi dan menyebarkan pesan positif Shanghai melawan narasi media Barat, membuktikan adaptasi *two-step flow* dalam menjaga narasi kebijakan nasional di tengah globalisasi. (Wangqu & Peres-Neto, 2023) Namun disisi lain, pendapat dari *opinion leader* juga dipergunakan oleh media asing yang sering mengandalkan suara otoritatif untuk membangun framing publik.

Opinion Leader Dalam Isu Kebijakan Dan Bencana

Opinion leaders merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki

pengaruh signifikan terhadap opini publik melalui kredibilitas, akses informasi, dan jaringan sosial mereka, sering kali mencakup elit politik, akademisi, NGO, aktivis, serta media nasional. Di Indonesia, *opinion leaders* seperti elit politik dan media nasional sering kali membentuk narasi publik melalui kepemilikan media dan afiliasi politik, di mana tokoh seperti pemilik media besar memengaruhi dukungan terhadap partai politik utama. Akademisi dan aktivis berperan sebagai pembentuk opini melalui kritik intelektual dan gerakan sosial, (Hasfi & Aminuddin, 2022) sementara NGO memperkuat legitimasi melalui advokasi hak asasi dan pengawasan kebijakan. Media nasional bertindak sebagai saluran utama, di mana jurnalis dan pemilik media menjadi opinion leaders yang membentuk persepsi publik terhadap isu politik. (Masduki, 2021)

Pimpinan opini umumnya memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari anggota masyarakat lainnya, seperti tingkat pendidikan formal yang relatif lebih tinggi, posisi sosial ekonomi yang lebih mapan, serta sikap yang lebih terbuka terhadap pembaruan dan inovasi. Mereka juga menunjukkan intensitas konsumsi media yang lebih tinggi, memiliki akses informasi yang luas, dan cenderung menjadi pihak yang lebih awal

dalam mengadopsi gagasan atau praktik baru. (Hartini & Hanafi, 2021) Kondisi tersebut membuat opinion leaders dipersepsikan sebagai figur yang kredibel dan dipercaya oleh lingkungannya. Selain itu, mereka memiliki kemampuan dalam mengoordinasikan komunikasi kelompok, bersifat inovatif, serta didukung oleh jaringan sosial yang luas, sehingga memungkinkan proses penyebarluasan informasi berlangsung secara efektif. *Opinion leaders* memainkan peran krusial dalam menginterpretasikan kebijakan publik dengan menyederhanakan informasi kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami masyarakat, sehingga membentuk persepsi kolektif terhadap efektivitas kebijakan tersebut. (Hamid, 2023) Tidak hanya di ranah nasional, Opinion leaders berfungsi sebagai mediator dengan menjembatani kritik internasional melalui reinterpretasi domestik, di mana mereka menyesuaikan narasi global agar selaras dengan konteks lokal untuk meredam tekanan eksternal.

Framing Media Asing tentang Banjir di Aceh

Berdasarkan analisis pemberitaan *Asia News Network*, *Lowy Institute*, dan *The Straits Times*, banjir di Aceh dibingkai oleh media asing bukan semata sebagai peristiwa

alam, melainkan sebagai krisis kemanusiaan berskala besar yang melampaui kapasitas lokal. Framing ini dibangun melalui seleksi fakta tentang besarnya korban jiwa, luasnya wilayah terdampak, keterisolasi daerah, serta penderitaan warga yang berlarut pascabencana. Dengan demikian, banjir diposisikan sebagai bencana sistemik yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Pada level pendefinisian masalah, media asing mendefinisikan banjir Aceh sebagai bencana luar biasa dengan dampak kemanusiaan ekstrem. *Asia News Network* menekankan skala kehancuran melalui penyebutan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur lintas provinsi, dengan menyatakan bahwa “*thousands of homes and other buildings, as well as roads and bridges connecting regions across the three provinces, were destroyed*”. Framing ini memosisikan banjir bukan sebagai insiden lokal, melainkan krisis regional yang melumpuhkan konektivitas sosial dan ekonomi. Selain itu, penekanan temporal melalui frasa seperti “*a week after*” dan “*three weeks after the disaster*” membangun persepsi bahwa banjir merupakan krisis berlarut yang belum tertangani dan terus memperparah penderitaan masyarakat.

Dalam penafsiran penyebab, media asing mengaitkan banjir Aceh dengan fenomena alam ekstrem yang jarang terjadi, khususnya *Tropical Cyclone Senyar* yang terbentuk di Selat Malaka. *Asia News Network* menyebut siklon tersebut sebagai “*a rare storm forming in the Malacca Strait*”, yang memicu hujan deras berkepanjangan, banjir, dan longsor di Aceh. Dengan demikian, penyebab awal banjir dibingkai sebagai akibat dari anomali iklim dan cuaca ekstrem. Namun, *Lowy Institute* memperluas penafsiran penyebab dengan mengaitkan banjir Aceh pada kerentanan struktural lingkungan, seperti degradasi daerah aliran sungai, deforestasi, dan pelanggaran tata ruang. Dalam narasi ini, banjir tidak dipahami sebagai bencana alam murni, tetapi sebagai konsekuensi dari akumulasi kerentanan ekologis yang memperbesar dampak cuaca ekstrem terhadap masyarakat Aceh.

Pada dimensi evaluasi moral, media asing membingkai banjir Aceh sebagai tragedi kemanusiaan yang menuntut empati dan solidaritas. *The Straits Times* menyoroti penderitaan warga melalui gambaran desa-desa yang masih terisolasi, keterbatasan akses air bersih, serta warga yang bertahan hidup dengan “*meagre rations*”, sehingga

masyarakat Aceh diposisikan sebagai korban utama dalam kondisi darurat. Penonjolan simbol sosial seperti pengibaran bendera putih di Aceh berfungsi sebagai ekspresi keputusasaan warga sekaligus penanda bahwa krisis telah melampaui kapasitas normal penanggulangan bencana. Framing ini mencerminkan *humanitarian gaze* media asing yang menempatkan penderitaan Aceh sebagai objek pengawasan moral, dengan kecenderungan menilai krisis sebagai kegagalan struktural negara berkembang.

Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit sebagai rekomendasi kebijakan, media asing secara implisit mengarahkan audiens pada pemahaman bahwa banjir Aceh membutuhkan penanganan luar biasa dan dukungan berskala besar. Penekanan pada keterisolasi wilayah, jumlah korban, serta keterbatasan akses logistik menyiratkan bahwa bencana ini tidak dapat diperlakukan sebagai banjir rutin, melainkan sebagai krisis kemanusiaan yang memerlukan mobilisasi sumber daya secara cepat dan luas. *Lowy Institute*, khususnya, menyiratkan bahwa banjir Aceh harus dipahami sebagai peringatan atas lemahnya ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, sehingga penanganan ke depan tidak cukup

hanya bersifat darurat, tetapi juga menuntut perubahan pendekatan terhadap mitigasi risiko dan perlindungan lingkungan.

Framing media asing secara konsisten menempatkan banjir Aceh sebagai krisis kemanusiaan dan struktural yang melampaui kategori bencana alam semata. Banjir direpresentasikan sebagai hasil interaksi antara cuaca ekstrem dan kerentanan lingkungan, dengan masyarakat Aceh diposisikan sebagai korban utama dalam kondisi ketahanan sosial dan ekologis yang rapuh.

Framing Respons Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan pemberitaan *Asia News Network*, *Lowy Institute*, dan *The Straits Times*, respons kebijakan pemerintah Indonesia tentang banjir di Sumatra khususnya Aceh, dibingkai sebagai lamban, tidak terkoordinasi, dan lebih bersifat simbolik dibanding substantif. Media asing secara konsisten menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan krisis, namun dengan penekanan pada kesenjangan antara skala bencana dan kapasitas kebijakan yang ditampilkan. Framing ini dibangun melalui seleksi pernyataan pejabat, pandangan pakar, serta representasi praktik kebijakan di lapangan

yang dinilai tidak sejalan dengan urgensi krisis.

Pada level pendefinisian masalah, media asing mendefinisikan respons kebijakan pemerintah sebagai tidak memadai dalam menghadapi skala krisis. *Asia News Network* menegaskan bahwa “*a week after cyclone-induced floods and landslides hit three provinces in Sumatra, authorities are still scrambling to find those who are missing and to distribute aid*”, yang membingkai kebijakan sebagai reaktif dan tertinggal dari kebutuhan lapangan. Keterlambatan distribusi bantuan dan masih terisolasinya sejumlah wilayah di Aceh diposisikan sebagai indikator utama lemahnya manajemen kebijakan bencana. *Lowy Institute* memperkuat definisi ini dengan menyatakan bahwa banjir Sumatra “*ticked every box for national disaster status*”, namun pemerintah tetap tidak menetapkan status tersebut. Keputusan ini dibingkai sebagai kegagalan kebijakan strategis yang menghambat pelepasan dana darurat, realokasi anggaran lintas kementerian, dan akses bantuan internasional. Dengan demikian, problem kebijakan tidak hanya dilihat pada tataran teknis, tetapi juga pada keputusan politik tingkat nasional.

Dalam atribusi penyebab, media asing secara dominan mengarahkan tanggung jawab pada pemerintah pusat dan lemahnya koordinasi institusional. *Asia News Network* mengutip pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang menyebut respons pemerintah “*slow, uncoordinated and poorly prepared*”, sekaligus menyoroti ketidaksiapan pemerintah daerah yang tidak diimbangi dukungan cepat dari pusat. Pernyataan ini membingkai kegagalan respons sebagai akibat dari sistem kebijakan yang tidak siap menghadapi bencana berskala besar. Konflik pernyataan antarpejabat juga dijadikan dasar atribusi penyebab. Klaim Kepala Basarnas bahwa seluruh wilayah terdampak telah terjangkau bantuan dikontraskan dengan pernyataan Pangdam Bukit Barisan yang menyebut puluhan lokasi masih terisolasi. Kontradiksi ini dibingkai sebagai bukti lemahnya koordinasi kebijakan dan komunikasi krisis antar lembaga negara.

Lowy Institute memperluas atribusi penyebab dengan menempatkan respons pemerintah dalam kerangka *reactionary governance*, yaitu pola kebijakan yang hanya bergerak setelah bencana terjadi tanpa investasi serius pada mitigasi struktural. Dalam framing ini, lambannya respons dipahami sebagai gejala dari pengabaian

jangka panjang terhadap pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan kapasitas institusi kebencanaan. Pada dimensi evaluasi moral, media asing membingkai respons kebijakan pemerintah sebagai tidak empatik dan mencederai rasa keadilan kemanusiaan. *Asia News Network* menyoroti pernyataan pejabat yang dinilai meremehkan situasi, seperti komentar Kepala BNPB yang menyebut kondisi “terlihat lebih parah di media sosial dibanding di lapangan”. Pernyataan ini dibingkai sebagai *insensitive remarks* yang memperlebar jarak antara negara dan penderitaan korban.

The Straits Times menekankan dimensi moral melalui isu penolakan dan penundaan bantuan asing. Keputusan mengembalikan bantuan dari Uni Emirat Arab serta lambannya persetujuan bantuan dari Malaysia dibingkai sebagai tindakan yang “*embarrassing*” dan tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, terutama ketika warga terdampak masih kekurangan bantuan dasar. Komentar Mendagri yang menyebut nilai bantuan asing “tidak signifikan” juga dievaluasi secara moral sebagai bentuk arogansi kebijakan yang merusak citra negara dan kepercayaan publik. Simbol-simbol protes seperti pengibaran bendera putih oleh warga Aceh turut dipilih media asing untuk

menegaskan penilaian moral bahwa respons kebijakan negara tidak sebanding dengan tingkat penderitaan masyarakat. Liputan ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara rawan tata kelola, di mana banjir digambarkan bukan semata bencana alam melainkan akibat korupsi, degradasi ekologis, dan ketidakmampuan manajemen risiko, dengan perbandingan negatif terhadap bantuan internasional pasca-tsunami 2004.

Dalam aspek rekomendasi, media asing secara implisit menekankan perlunya perubahan pendekatan kebijakan dari respons darurat jangka pendek ke reformasi struktural. *Lowy Institute* secara eksplisit menyatakan bahwa krisis ini bukan sekadar persoalan manajemen bencana, melainkan “*about reactionary governance*”, sehingga solusi kebijakan tidak cukup melalui penggerahan militer atau kunjungan simbolik pemimpin. Media ini mendorong perlunya penegakan hukum tata ruang, perlindungan daerah aliran sungai, penguatan institusi kebencanaan, serta penyelarasan anggaran dengan agenda mitigasi risiko. Dengan framing ini, kebijakan pemerintah dinilai gagal bukan karena tidak bertindak sama sekali, tetapi karena bertindak secara parsial dan tidak menyentuh akar masalah struktural. Dalam hal ini, framing media asing

menempatkan respons kebijakan pemerintah Indonesia terhadap banjir di Aceh sebagai lamban, tidak terkoordinasi, dan lebih menekankan performa simbolik daripada efektivitas kebijakan. Pemerintah pusat direpresentasikan sebagai aktor dominan yang memiliki otoritas besar, namun gagal menerjemahkan kewenangan tersebut ke dalam tindakan kebijakan yang cepat, empatik, dan sistemik. Dalam konstruksi ini, kegagalan respons kebijakan tidak dipahami sebagai kesalahan teknis semata, melainkan sebagai refleksi dari persoalan tata kelola dan orientasi kebijakan negara dalam menghadapi krisis kebencanaan.

Representasi Masyarakat Aceh

Media asing secara konsisten merepresentasikan masyarakat Aceh sebagai kelompok yang berada dalam posisi rentan akibat bencana, sekaligus terdampak oleh keterbatasan kapasitas penanganan darurat di tingkat lokal. Representasi ini tidak hanya menempatkan warga sebagai korban bencana alam, tetapi juga sebagai komunitas yang mengalami keterisolasi dan keterbatasan sumber daya dalam menghadapi situasi krisis. Dalam konteks ini, penderitaan masyarakat Aceh ditampilkan melalui narasi ketidakmampuan lokal untuk merespons skala bencana yang besar. *Asia News*

Network menegaskan representasi tersebut melalui pernyataan pejabat daerah Aceh yang menyatakan keterbatasan anggaran dan peralatan dalam menangani kondisi darurat “*Our local capacity, both in terms of budget and equipment, is no longer sufficient to respond to the scale of emergency.*”

Kutipan ini memosisikan masyarakat Aceh sebagai pihak yang terdampak langsung oleh keterbatasan struktural di tingkat daerah, di mana kapasitas lokal digambarkan tidak sebanding dengan besarnya krisis yang terjadi. Dalam framing ini, suara pejabat daerah berfungsi sebagai representasi tidak langsung atas kondisi warga, sementara masyarakat itu sendiri jarang tampil sebagai aktor yang memiliki ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka secara mandiri. Selain itu, media asing juga menonjolkan dimensi kemanusiaan dengan menggambarkan kondisi hidup warga Aceh secara konkret, seperti keterbatasan akses terhadap air bersih, logistik, dan layanan dasar. *The Straits Times* menampilkan narasi penderitaan warga melalui deskripsi berikut: “*Residents continue to struggle to access clean water, while many have fallen ill as they survive on meagre rations.*”

Penggambaran semacam ini memperkuat representasi Aceh sebagai ruang krisis kemanusiaan, di mana masyarakat digambarkan berada dalam kondisi bergantung pada bantuan eksternal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Warga lebih sering diposisikan sebagai penerima bantuan daripada sebagai subjek dengan kapasitas sosial dan politik untuk berpartisipasi aktif dalam proses penanganan bencana. Pada tingkat yang lebih luas, representasi masyarakat Aceh dalam media asing juga dikaitkan dengan pola penanganan bencana yang bersifat jangka pendek dan reaktif. *Lowy Institute*, misalnya, menempatkan penderitaan warga terdampak dalam kerangka kegagalan tata kelola yang berulang, dengan menyebut bahwa situasi ini mencerminkan “*reactionary governance*”. Dalam narasi ini, masyarakat Aceh direpresentasikan sebagai kelompok yang terjebak dalam siklus krisis, di mana negara hadir terutama dalam bentuk respons simbolik dan temporer, sementara akar kerentanan struktural tetap tidak terselesaikan. Namun, pada saat yang sama, representasi semacam ini berpotensi menyederhanakan kompleksitas sosial Aceh, karena lebih menekankan aspek kerentanan dan ketergantungan masyarakat, sementara

kapasitas lokal, bentuk-bentuk agensi sosial, serta daya tahan komunitas dalam menghadapi krisis relatif kurang memperoleh perhatian dalam pemberitaan media asing.

Peran *Opinion Leaders* dalam *Two-Step Flow*

Dalam pemberitaan media asing mengenai krisis banjir di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya, aktor elit dan pakar secara konsisten diposisikan sebagai opinion leaders yang berfungsi sebagai perantara simbolik (*symbolic intermediaries*) antara peristiwa bencana dan pemaknaan publik internasional. (Raza et al., 2025) Mengacu pada kerangka *Two-Step Flow of Communication*, media tidak hanya menyampaikan fakta empiris, tetapi menyalurkan interpretasi melalui suara otoritatif pejabat, pakar kebijakan publik, dan ahli kebencanaan yang memberi legitimasi terhadap framing yang dibangun.(Tao & Shi, 2025)

Asia News Network, misalnya, menampilkan pernyataan kepala daerah dan pakar kebijakan untuk menegaskan keterbatasan kapasitas lokal serta lemahnya koordinasi negara. Pernyataan Bupati Nagan Raya, Aceh, yang menyebut bahwa kapasitas anggaran dan peralatan daerah tidak lagi mencukupi untuk merespons skala darurat, tidak sekadar berfungsi sebagai informasi

situasional, tetapi menjadi perangkat framing yang menggeser fokus tanggung jawab dari level lokal ke pemerintah pusat. Dalam konteks *Two-Step Flow*, figur pejabat daerah ini bertindak sebagai opinion leader yang menerjemahkan kondisi lapangan ke dalam narasi kegagalan struktural negara. Peran serupa diperkuat melalui kutipan pakar kebijakan publik dan manajemen bencana. *Asia News Network* mengutip Tribus Rahadiansyah dan Eko Teguh Paripurno untuk menilai respons pemerintah sebagai lamban, tidak terkoordinasi, dan tidak selaras dengan persepsi publik mengenai situasi darurat. Pendapat para pakar ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi epistemik, di mana kritik terhadap negara tidak disajikan sebagai opini jurnalistik semata, melainkan sebagai kesimpulan rasional berbasis keahlian. Dengan demikian, media asing menempatkan *opinion leaders* sebagai aktor kunci yang memediasi makna krisis antara peristiwa empiris dan audiens global.

Fungsi *opinion leaders* sebagai perantara simbolik juga tampak dalam pemberitaan *Lowy Institute* yang secara eksplisit mengaitkan bencana dengan kegagalan tata kelola jangka panjang. Narasi tentang “*reactionary governance*” dan siklus “respon–lupa–respon” membingkai krisis

banjir bukan sebagai kejadian alamiah semata, melainkan sebagai konsekuensi dari pengabaian institusional dan lemahnya penegakan kebijakan. Dalam konteks ini, *Lowy Institute* berperan sebagai *elite opinion leader* di level internasional yang menyediakan kerangka interpretatif struktural bagi pembaca global, sekaligus memperkuat kritik terhadap kapasitas negara dalam mengelola risiko bencana. Sementara itu, *The Straits Times* menggabungkan suara pejabat, warga terdampak, dan elit politik nasional untuk membangun legitimasi moral terhadap framing kegagalan kebijakan, khususnya terkait penolakan bantuan asing dan keterlambatan penetapan status darurat nasional. Kutipan warga yang kesulitan mengakses air bersih dan bertahan dengan logistik terbatas diposisikan berdampingan dengan pernyataan pejabat pusat, menciptakan kontras simbolik antara penderitaan masyarakat dan kalkulasi politik negara. Dalam kerangka *Two-Step Flow*, figur-figur elit dan pakar dalam media ini berfungsi sebagai jembatan interpretatif yang mengarahkan audiens internasional pada kesimpulan normatif bahwa krisis tersebut mencerminkan persoalan tata kelola, bukan sekadar keterbatasan teknis.

Peran aktor elit dan pakar dalam pemberitaan media asing menunjukkan bahwa proses framing krisis banjir di Aceh dan Sumatra berlangsung melalui mekanisme mediasi simbolik, di mana *opinion leaders* berfungsi sebagai penguat utama legitimasi narasi. Kehadiran mereka tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga mengarahkan penilaian publik, menetapkan locus tanggung jawab, serta membentuk makna politik dari bencana yang terjadi. Dengan menempatkan suara elit dan pakar sebagai rujukan otoritatif, media asing memperkuat framing kritis terhadap respons kebijakan pemerintah Indonesia dan membangun persepsi internasional bahwa krisis tersebut mencerminkan persoalan tata kelola struktural, bukan semata keterbatasan teknis dalam penanganan bencana.

Selain diproduksi oleh media asing, kritik terhadap respons kebijakan pemerintah dalam krisis banjir Aceh juga berkembang dalam diskursus domestik melalui pernyataan politik, opini publik, dan respons masyarakat sipil. Di tingkat legislatif, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara terbuka meminta pemerintah agar tidak menolak bantuan luar negeri dan memanfaatkan dukungan internasional untuk mempercepat pemulihan warga terdampak, dengan menegaskan

bahwa bantuan asing seharusnya diterima apabila dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat (Anggi Muliwati,2025). Pernyataan ini mencerminkan resonansi kritik media asing terkait keterlambatan dan keterbatasan respons negara.

Diskursus serupa juga muncul melalui aktor masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menafsirkan fenomena pengibaran bendera putih di Aceh sebagai bentuk ultimatum simbolik masyarakat terhadap pemerintah agar membuka ruang bantuan global (Aryaguna,2026). Pernyataan ini kemudian disirkulasikan luas oleh media nasional dan platform digital, memperkuat kritik bahwa kebijakan respons pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kemanusiaan di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah pusat mempertahankan narasi kapasitas nasional melalui pernyataan Menko PM Muhammin Iskandar yang menegaskan bahwa kemampuan internal masih memadai sehingga bantuan asing dianggap belum diperlukan (Robiatul, 2025). Perbedaan narasi ini memicu perdebatan publik di ruang digital dan media nasional, di mana kritik warganet dan analis kebijakan mempertanyakan kesenjangan antara klaim

kapasitas negara dan realitas penderitaan warga terdampak.

Secara keseluruhan, diskursus domestik menunjukkan bahwa framing media asing tidak berhenti pada level internasional, tetapi diterjemahkan dan dinegosiasikan oleh *opinion leaders* nasional dalam konteks politik dan sosial Indonesia. Proses ini menegaskan mekanisme *two-step flow of communication*, di mana framing global memperoleh legitimasi dan makna lokal melalui mediasi aktor politik, masyarakat sipil, dan elit kebijakan, bukan melalui efek langsung kepada audiens akhir.

IV. SIMPULAN

Pemberitaan media asing mengenai banjir Aceh membingkai peristiwa tersebut bukan semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai krisis kemanusiaan dan struktural yang merefleksikan kelemahan tata kelola bencana di Indonesia. Respons kebijakan pemerintah direpresentasikan sebagai lamban, kurang terkoordinasi, dan cenderung reaktif, terutama melalui narasi keterlambatan distribusi bantuan, ketidaktegasan penetapan status bencana nasional, serta kontroversi penolakan bantuan internasional. Framing ini membentuk evaluasi normatif terhadap

kapasitas negara dalam mengelola krisis, sekaligus menempatkan Aceh sebagai wilayah yang mengalami kerentanan struktural berlapis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa framing media asing tidak bekerja secara langsung dalam membentuk opini publik domestik, melainkan dimediasi oleh *opinion leaders* seperti akademisi, pakar kebijakan, aktivis, dan elit politik daerah. Melalui mekanisme *two-step flow of communication*, narasi global tersebut diterjemahkan, dikontekstualisasikan, dan dilegitimasi dalam diskursus nasional, sehingga persepsi publik terhadap respons kebijakan bencana terbentuk melalui interaksi antara framing media asing dan otoritas simbolik *opinion leaders* dalam ruang politik dan sosial Indonesia. Dalam konteks globalisasi informasi, kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan bencana tidak hanya menuntut kesiapan teknis dan logistik, tetapi juga strategi komunikasi kebijakan yang proaktif, transparan, dan konsisten dalam merespons dinamika persepsi publik domestik maupun internasional. Ketidaksinkronan antara kebijakan substantif dan komunikasi publik berpotensi memperkuat framing negatif serta melemahkan legitimasi negara di mata publik

global, sehingga humas negara dan institusi komunikasi pemerintah perlu memiliki kapasitas komunikasi strategis yang memahami logika framing media internasional serta peran *opinion leaders* sebagai aktor kunci dalam mediasi makna, agar respons komunikasi tidak bersifat defensif atau reaktif semata, melainkan mampu mengantisipasi tekanan narasi global dan membangun kredibilitas kebijakan secara berkelanjutan dalam konteks krisis.

Sebagai keterbatasan, penelitian ini hanya menganalisis tiga media asing dan berfokus pada analisis framing berbasis teks, sehingga belum mencakup variasi framing dari media internasional lain maupun studi resepsi audiens secara empiris. Selain itu, peran *opinion leaders* dianalisis secara diskursif-konseptual, bukan melalui pengukuran langsung efek komunikasi. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan studi komparatif lintas media, mengombinasikan analisis framing dengan riset audiens, serta mengeksplorasi strategi komunikasi negara dalam menghadapi tekanan narasi global pada konteks bencana dan kebijakan publik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. P., Putra, A. M., & Mulyana, A. (2022). Pendekatan Model Strategi Komunikasi Bencana Gempabumi dan Tsunami di Kota Cilegon. *Majalah Ilmiah Methoda*, 12(3), 246–251.
- Almakaty, S. (2025). *The Two-Step Flow Theory in the Digital Age (2005–2025): An Analytical*.
- Aryaguna, B. (2026, January 11). Usman Hamid: “Bendera putih di Aceh ultimatum rakyat, pemerintah harus buka bantuan global”. AcehGround. <https://acehground.com/news/usman-hamid-bendera-putih-di-aceh-ultimatum-rakyat-pemerintah-harus-buka-bantuan-global/>
- Butsi, F. I. (2019). Mengenal analisis framing: Sejarah dan metodologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 1(2), 52–58.
- Candra, R., Katimin, & Samosir, H. E. (2025). Peran kelompok aktivis sebagai komunikator politik dalam membangun kesadaran publik. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(1), 115–124.
- Chen, H., Zhu, Z., Qi, F., Ye, Y., Liu, Z., Sun, M., & Jin, J. (2020). Country image in COVID-19 pandemic: A case study of China. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(1), 81–92.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (N. Huda (ed.)). Lkis Pelangi Aksara.
- Fatharani, R. B. (2023). Incidental news exposure and opinion leader's role in spreading climate change information and environment-friendly behavior on social media. *Informasi*, 53(1), 151–160.
- Ghfari, R. I. and D. (2025). *Leaders of Indonesia's Northern Sumatra raise white flag amid deadly floods*. Asian News Network.

- Hafidli, M. N., Sasmita, R. N. D. L., Nurazhari, L., & Putri, N. R. G. (2023). Analisis framing model Robert Entman tentang kasus Kanjuruhan di detikcom dan bbc news. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 178–183.
- Hamid, I. (2023). The Role of Traditional Opinion Leaders in Political Decision-Making: A Case Study of Coastal Communities in Eastern Indonesia. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 6(1), 295–307.
- Hartini, S., & Hanafi, A. (2021). Pengaruh Kredibilitas dan Karakteristik Opinion Leader terhadap Behavioral Intention Konsumen pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10, 211. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.704>
- Hasfi, N., & Aminuddin, A. T. (2022). The Voice of Academics on Omnibus Law on YouTube: Undermining Public Transparency. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7, 83–100. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i1.665>
- Hilberts, S., Govers, M., Petelos, E., & Evers, S. (2025). The Impact of Misinformation on Social Media in the Context of Natural Disasters: Narrative Review. *JMIR Infodemiology*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.2196/70413>
- Indonesia, D. W. (DW). (2025). *Mendagri respons soal Aceh minta PBB bantu tangani bencana*. DW Indonesia.
- Kehutanan, K. (2025). *Banjir Melanda Aceh-Sumut, Kementerian Kehutanan Siapkan Solusi Pemulihan dan Penguatan DAS*. Kementerian Kehutanan - Siaran Pers Nomor: SP.344/HUMAS/PP/HMS.3/11/2025. <https://www.kehutanan.go.id/news/banjir-melanda-aceh-sumut-kementerian-kehutanan-siapkan-solusi-pemulihan-dan-penguatan-das>
- Kompas. (2025). *DIR Ungkap Alarm Serius soal Penanganan Bencana Sumatera, Sentimen Negatif Bisa Menjalar ke Krisis Legitimasi Politik*. Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. <https://deepindonesia.org/dir-ungkap-alarm-serius-soal-penanganan-bencana-sumatera-sentimen-negatif-bisa-menjalar-ke-krisis-legitimasi-politik/>
- Kustiawan, W., Matondang, J. D., Ibnuburahman, I., Syahputra, R., Tajuddin, A., & Firdasari, S. (2024). Komunikasi Krisis dalam Penyiaran: Studi Kasus Penanganan Bencana Alam di Media Televisi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2 SE-Articles of Research), 26484–26489. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16479>
- Masduki. (2021). Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225>
- Muliawati, A. (2025, December 17). Komisi V DPR minta pemerintah tak tolak bantuan dari luar negeri. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8263577/komisi-v-dpr-minta-pemerintah-tak-tolak-bantuan-dari-luar-negeri>
- Muntahar, R. (2025). *Banjir di 16 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh per 27 November , 20.759 Jiwa Mengungsi, Satu Orang Hilang Terseret Arus Banjir*. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/banjir-di-16-kabupaten-kota-provinsi-aceh-per-27-november-20759-jiwa-mengungsi-satu-orang->

- hilang-terseret-arus-banjir
- Noe, A. (2025). Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>
- Peace, G. (2025). *Banjir Sumatera Harus Jadi Pengingat Terakhir Pemerintahan Prabowo untuk Berbenah*. Greenpeace Indonesia – Siaran Pers. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65560/banjir-sumatera-harus-jadi-pengingat-terakhir-pemerintahan-prabowo-untuk-berbenah/>
- Pemerintah larang kegiatan delapan korporasi yang turut memicu banjir di Sumatra Utara. (2025). *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cze8w19959no>
- Rahmawan, A. B., Eliana, G., Habibi, L. A., & Nariswari, A. A. (2024). A comparative study of earthquake disaster management laws between USA and Indonesia. *Jamba (Potchefstroom, South Africa)*, 16(1), 1582. <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1582>
- Raza, M., Khalil, H., Fareed, M., Eneizat, M. F., Ab Ul Hassan, A., & Faizuddin, A. (2025). Resilience or Rhetoric? A Framing Analysis of Flood Disaster Reporting in Pakistan's Media. *Journalism and Media*, 6(4), 185.
- Robiatul, E. (2025, December 10). Begini alasan pemerintah belum terima bantuan dari luar negeri soal bencana Sumatra. JPNN.com. <https://www.jpnn.com/news/begini-alasan-pemerintah-belum-terima-bantuan-dari-luar-negeri-soal-bencana-sumatra>
- Serafino, M., Clemente, G. V., Flaminio, J., Szymanski, B. K., Lizardo, O., & Makse, H. A. (2024). Analysis of flows in social media uncovers a new multi-step model of information spread. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2024(11), 113402.
- Tao, Z., & Shi, Y. (2025). The dynamic collaboration in crisis communication: a complex adaptive systems perspective. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1883.
- Wahyuningsih, D. (2020). *Analisis Penggunaan Media Sosial Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di DKI Jakarta Tahun 2020*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wangqu, J., & Peres-Neto, L. (2023). Verification of Two-Step Flow Model in the Process of City International Image Communication Based on Data Mining and Empirical Analysis. *Journalism and Media*, 4, 1039–1047. <https://doi.org/10.3390/journalmedia4040066>
- Wati, I. (2021). Pengaruh komunikasi massa terhadap khalayak. *PROSIDING FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 1, 9–17.
- Widyaya, I., & Setiawan, W. (2024). Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 1–16.